

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Bagi negara multibangsa¹ seperti Indonesia, adanya keragaman budaya merupakan kenyataan sosial yang sudah niscaya. Namun demikian, keragaman ini tidak secara otomatis diterima secara positif pula. Bangsa Indonesia memiliki catatan sejarah kelam tentang bagaimana masyarakatnya yang multikultural ini hidup dan berinteraksi. Setelah berakhirnya periode Orde Baru, dan dikibarkannya bendera reformasi, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula pada tahun 1997, pada gilirannya juga mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis sosial budaya yang dimaksud dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi di kalangan masyarakatnya, misalnya, disentrigrasi sosial-politik yang nyaris kebablasan, lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi kenyataan kehidupan yang semakin sulit sehingga kelompok masyarakat mudah untuk melakukan berbagai tindakan anarkhi, merosotnya penghargaan dan kepatuhan kepada hukum, etika, dan kesantunan sosial, semakin meluasnya penyebaran narkoba dan berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber, atau setidaknya bernuansa politis, etnis, agama.²

Berbagai konflik bermuatan kekerasan yang berkepanjangan dan tragedi kemanusiaan telah tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Kondisi ini dalam konteks keberagamaan Indonesia, berdasarkan catatan pertemuan Dewan Antar-agama Indonesia (*Inter Religius Council/IRC*) pada 14 Juli 2010, menyatakan bahwa

Konsep tentang negara bangsa dijelaskan dalam bab pengantar buku "Kewargaan Multikultural", diberikan pemisahan definisi oleh Clifford Geertz pada kata negara (*state*), bangsa (*nation*), negeri (*country*), masyarakat (*society*) dan rakyat (*people*). Selanjutnya, Will Kymlicka mencatat bahwa Negara multibangsa diartikan sebagai negeri dengan banyak bangsa. Bangsa dijelaskan sebagai sebuah komunitas historis, yang memiliki institusionalnya sendiri, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, mempunyai bahasa dan kebudayaan lokalnya sendiri. Masuknya bangsa-bangsa ke dalam sebuah wadah negara bisa terjadi karena adanya penaklukan dari negara, maupun melalui sebuah kesepakatan dari bangsa-bangsa itu untuk membentuk wadah bersama demi sebuah tujuan bersama. Pengetian negara multibangsa ini, kemudian dibandingkan dengan pengertian negara polietnis. Negara polietnis merupakan negara dengan keanekaragaman etnis yang dimiliki warganya. Kebanyakan negara dunia adalah negara polietnis, yang disebabkan oleh adanya migrasi dari warga bangsa lain. Negara multibangsa dan negara polietnis merupakan konsep mendasar dari masyarakat multikultural. Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, penerjemah Edlina H. Addin, (LP3S, 2003), vii-viii, 13-16. Berkaitan dengan ini, Indonesia merupakan Negara yang sangat cocok untuk menjadi contoh penjelasan dari kata negara multibangsa.

² Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Impulze, 2007), 8-9.

ketegangan dan potensi konflik dalam hubungan antar-umat beragama di Indonesia masih sangat besar terjadi di Indonesia. Ketegangan dan potensi konflik tersebut antara lain berbentuk kekerasan, pemaksaan kehendak, perusakan tempat ibadah, dan lainnya.³ Menurut Abdurrahman Wahid, akar dari masalah disintegrasi dan dislokasi yang dialami oleh negara Indonesia pada era reformasi ini terkait dengan paling kurang tiga masalah dasar, yaitu masalah agama, nasionalisme dan rakyat.⁴ Ketiga masalah besar ini masih kurang diperhatikan secara lebih serius sehingga merupakan hal-hal yang mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pertama, masalah agama, agama manapun menyandarkan diri pada suatu otoritas mutlak yang hadir melalui simbol-simbol agama. Agama dapat diambil sebagai perekat sosial karena dalam dirinya tersedia sistem makna yang hadir melalui simbol-simbol agama. Dengan sistem makna inilah manusia disatukan dan terjadi kohesi sehingga terbentuk komunitas agama. Ada kecenderungan dalam diri manusia sebagai bagian alami manusia untuk mempertahankan komunitas tersebut melalui suatu rangkaian sosialisasi atau internalisasi secara berkesinambungan antargenerasi. Dalam proses ini, peluang untuk terjadinya penguatan simbol yang sudah ada, dan pembatasan (*boundary maintenance*) dari simbol yang lain, sehingga komunitas dapat dipertahankan. Dalam rangka mempertahankan identitas tersebut, terdapat kecenderungan dari anggota komunitas agama untuk bersikap eksklusif, bahkan seringkali membuat pencitraan yang bersifat *prejudice* tentang komunitas agama lain dan simbol-simbol dalam komunitas itu. Disinilah komunitas agama tertentu kemudian membentuk jarak sosial (*social distance*) berdasarkan kepada pengelompokan agama. Jika sudah demikian, kekecewaan dan kecemburuan komunitas agama yang mungkin lebih bersifat ekonomi dan politis, membuat komunitas agama rentan melakukan kekerasan atas nama agama. Sifat alami mempertahankan komunitas dari manusia inilah, yang kemudian meningkatkan intensitas emosi anggotanya, yang melalui sebuah proses sosiologis yang disebut amplifikasi interaksional (*interactional amplification*), yakni suatu proses para anggota saling memberi rangsangan dan respons satu sama lainnya, sehingga intensitas emosi

³ "Potensi Konflik Antar-Agama di RI Masih Ada" dalam <http://nasional.vivanews.com/news/read/164542-potensi-konflik-antar-agam3-masih-ada>, download 8 Agustus 2013.

⁴ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama dan Negara, Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali Abdur Razig*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), 4.

dan tanggapan anggota komunitas mengalami peningkatan. Dengan rangsangan emosi itu, sebuah kasus yang terjadi di masyarakat yang pada mulanya hanya terbatas antarindividu dan kelompok yang sempit, bahkan seringkali hanya persoalan sepele, dapat berkembang menjadi perilaku kolektif yang dapat membawa pengaruh yang lebih luas. Inilah yang kemudian menjadi satu titik dimulainya konflik, dan karena hal ini menyangkut agama, maka potensi diaspora dalam penyebarannya sangat rentan terjadi.⁵ Kedua, masalah nasionalisme, kehidupan bangsa dan negara Indonesia diberkahi dengan kenyataan adanya berbagai budaya etnis, agama sebagaimana yang diakui dalam lambang negara "Bhinneka Tunggal Ika." Lambang negara tersebut bukan sesuatu yang telah jadi, tapi sesuatu yang dalam proses menjadi. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika merupakan pengertian kesejarahan masyarakat dan bangsa Indonesia karena menunjukkan keadaan masa lalu, persoalan masa kini, dan tugas untuk mewujudkannya di masa mendatang. Gejala-gejala disintegrasi yang melanda bangsa Indonesia terjadi karena ada tindakan yang menyepelkan kebhinekaan bangsa Indonesia.⁶ Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa semenjak kemerdekaan, negara bangsa Indonesia memiliki prinsip Bhineka Tunggal Ika tapi tetap saja selalu ada upaya untuk lebih menekankan "ketunggalan", ketimbang "kebhinekaan." Dan ketika situasi sosial-politik berubah, ketika masyarakat mengalami dislokasi dan disorientasi, ketika itu pulalah muncul kelompok-kelompok masyarakat yang kembali ingin menekankan "ketunggalan", dan "keseragaman" melalui berbagai upaya dan tindakan yang menolak dan tidak mengakui pluralitas negara bangsa Indonesia.⁷

Gejala-gejala ini mengantarkan masyarakat Indonesia pada era reformasi sebagai masyarakat penuh resiko (*hsk society*). Masyarakat penuh resiko merupakan tantangan dari gelombang kedua modernitas yang ditandai dengan adanya globalisasi, individualisme, revolusi gender, pengangguran dan resiko global akibat adanya krisis lingkungan dan krisis moneter, serta terjadinya benturan antar peradaban.⁸ Benturan antar peradaban ini yang oleh Samuel P. Huntington dijelaskan bahwa konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan

.....
⁵ Ngainum Naim dan Achmad Sauqi, *Konsep dan Aplikasi Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Penerbit AM, 2008), 23-25.

⁶ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2005), xxviii

⁷ Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan*, 6.

⁸ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*, 18-20.

ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah-masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Oleh karena itu, masyarakat penuh resiko ini harus ditangani dengan penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya penerapan ilmu pengetahuan di dalam meningkatkan taraf kehidupan manusia. Masyarakat berbasis ilmu pengetahuan ini harus diimbangi dengan membangun masyarakat yang mengakui akan hak-hak asasi manusia dan partisipasi setiap anggotanya di dalam membangun masyarakatnya (*civil society*). Sebuah masyarakat demokratis yang mengakui hak asasi manusia, hidup penuh toleransi dan saling menghargai.⁹ Hal mana tercakup dalam pendekatan multikulturalisme.

Pada titik ini, masyarakat yang multikultur seharusnya menjadi masyarakat yang mampu menekankan dirinya sebagai *arbitrer*, yaitu sebagai penengah bagi proses rekonsiliasi ketika proses dialektika tersebut (situasi konfliktual) menemui titik jenuh. Hal yang perlu untuk disadari adalah tidak mungkin sebuah masyarakat selamanya berada dalam keadaan damai tanpa persoalan, sebab justru dalam persoalan inilah dinamika hidup bergerak. Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang senantiasa memiliki optimisisme untuk menyelesaikan persoalan apapun yang dihadapi.¹⁰

Konteks multikultural yang demikian menyebabkan masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat hidup secara multikultural. Multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep bahwa sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultur). Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk mengakui dan menghormati budaya yang lain. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam komunitas. Peningkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.¹¹ Kebutuhan untuk diakui

⁹ H.A.R.Tilaar, *Multikulturalisme*, 12.

¹⁰ Ngainum Naim, *Pendidikan Multikultural*, 126-127.

¹¹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

terhadap hak hidup individu dan kelompok dalam masyarakat dengan kebudayaannya yang khas. Kebutuhan ini merupakan pendorong yang sangat kuat di belakang gerakan nasionalisme dalam kehidupan politik, bahwa tidak ada preferensi bagi masyarakat atau individu secara khusus, karena dalam masyarakat, semua orang mempunyai hak yang sama. Bagi Charles Taylor, suatu masyarakat dengan tujuan kolektif dapat bertahan apabila di dalamnya terdapat pengakuan, penghormatan serta penjaminan terhadap keanekaragaman dan hak-hak fundamental di dalamnya.¹²

Menuju masyarakat multikultur yang demikian, pendidikan memainkan peranan penting, yakni bahwa terdapat relasi resiprokal antara pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Kondisi masyarakat, dalam aspek kemajuan, peradaban dan yang lainnya tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Pendidikan berperan sebagai media transformasi sosial. Sebagai media transformasi sosial, pendidikan memiliki beragam fungsi, ia dapat berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan watak, alat pelatihan keterampilan, alat mengasah otak, alat meningkatkan pekerjaan, alat menanamkan nilai dan moral keagamaan, alat pembentuk kesadaran berbangsa, alat untuk menguasai teknologi, dan berbagai fungsi lainnya.¹³ Dalam kerangka fungsi yang demikian luas, pendidikan mulai jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, seharusnya didesain untuk membangun dan memberikan gambaran ideal tentang pluralitas dan multikultural.¹⁴

Salah satu paradigma yang berkembang dalam dunia pendidikan dan merupakan upaya untuk menjawab tantangan bagi transformasi sosial masyarakat dengan realita multikultural adalah pendidikan multikultural.¹⁵ Kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultural setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir dirasakan semakin mendesak bagi negara-bangsa multikultural. Di berbagai negara Barat, seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, sejak usainya Perang Dunia II semakin bersifat "multikultural" karena proses migrasi penduduk luar ke negara-negara tersebut. Pendidikan multikultural telah menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970-an, setelah sebelumnya Amerika

¹² *Politics of recognition* merupakan ide yang dikemukakan oleh Charles Taylor, melalui buku *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, ia dipengaruhi oleh tokoh Jean-Jacques Rousseau (melalui ide *preferential* yakni bahwa di dalam masyarakat tidak ada warga kelas satu dan warga kelas dua, semuanya memiliki hak yang sama) dan tokoh Immanuel Kant (melalui ide *dignity*, setiap orang memiliki martabat/dignity yang sama). Lihat H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*, 78-82.

¹³ Ngainum Naim, *Pendidikan Multikultural*, 27.

¹⁴ *Ibid.*, 27-28.

¹⁵ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 5.

Serikat misalnya telah mengembangkan pendidikan interkultural. Berhadapan dengan meningkatnya "multikulturalisme" di negara-negara tersebut, maka paradigma, konsep dan praktek pendidikan multikultural semakin relevan.¹⁶ Bagaimana dengan Indonesia?

Pendidikan multikultural merupakan strategi pendidikan bermekanisme belajar untuk seumur hidup. Masyarakat merupakan sekolah yang sejati. Sehingga pendidikan menjadi pendidikan yang bermekanisme belajar untuk seumur hidup, ketika anak mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang dianut dengan perilaku-perilaku bermasyarakat. Dalam hal ini, pendidikan multikultural bukan hanya menjadi tanggung jawab pendidikan pada jalur pendidikan formal, tetapi merupakan tanggungjawab komprehensif dari baik, jalur formal, informal, maupun non formal.

Secara khusus bagi pendidikan multikultural pada jalur pendidikan formal, pendidikan multikultural merupakan strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, bahasa, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural sekaligus juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka.¹⁷ Ada lima program prioritas dalam pendidikan multikultural, yakni sebagai berikut: *pertama* lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya, *kedua* pendidikan kewargaan, *ketiga* kurikulum pendidikan multikultural, *keempat* kebijakan perbukuan, dan *kelima* pendidikan guru. Kelima program prioritas ini disusun untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip pokok pendidikan multikultural yakni: *pertama* pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik baru yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia (*equity pedagogy*). Pedagogik kesetaraan ini bukan hanya mengakui akan hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa. Pedagogik kesetaraan berpangkal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat manusia (*dignity of man*). *Kedua* pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia cerdas. Manusia Indonesia yang cerdas adalah manusia yang dicirikan oleh manusia yang mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, manusia bermoral, bukanlah manusia yang ingin membenarkan apa yang dimilikinya, cita-citanya,

¹⁶ Asyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan*, 18.

¹⁷ Ainul M. Yaqin, *Pendidikan Multikultural*, 25-26.

agamanya, ideologi politiknya untuk dipaksakan kepada orang lain. Manusia cerdas adalah manusia yang mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hidup bersama sebagai kekayaan bersama dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.¹⁸

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pendidikan multikultural tidaklah dimaksud sebagai sebuah mata pelajaran baru dalam kurikulum pendidikan, tetapi merupakan strategi pendidikan yang diterapkan dalam seluruh mata pelajaran. Berkaitan dengan pokok kajian penelitian ini, yakni tentang Pendidikan Agama (Kristen), maka berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan multikultural, Pendidikan Agama Kristen seharusnya menjadi sarana yang tepat untuk memantapkan paham multikultural bagi peserta didik.

Pendidikan Agama sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah formal merupakan salah satu wadah yang sangat tepat untuk mengembangkan konsep-konsep multikultural kepada peserta didik. Pada sekolah formal seorang peserta didik akan bertemu dan berinteraksi dengan begitu ragamnya perbedaan identitas jika dibandingkan dengan interaksi yang dialaminya dalam lingkungan keluarga. Di samping kenyataan bahwa, Pendidikan Agama merupakan "menu wajib" yang harus dikonsumsi oleh siswa dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi di Indonesia .

Namun dalam prakteknya, pola Pendidikan Agama yang terpolar pada Pendidikan Agama menurut agama dari masing-masing agama yang dianut peserta didik seperti yang terjadi saat ini bersifat kontra-produktif dengan arti filosofis dari konsep multikultural. Karena dengan pola ini, masing-masing peserta didik diajarkan untuk terkumpul pada satu identitas keagamaan saja, dan ini tentu saja menutup ruang untuk berinteraksi secara lebih luas dengan peserta didik penganut agama lain dan pada sisi lain membuka ruang untuk mempertajam (bukannya menerima) konsep perbedaan. Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa dalam Pendidikan Agama di sekolah formal, seorang peserta didik diajar untuk mampu menjalankan ritual-ritual keagamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendidikan Agama di sekolah formal Indonesia saat ini berorientasi informatif dan dogmatis. Pola seperti ini dapat melahirkan sikap resistensi

¹⁸ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*, 216-232.

terhadap keragaman yang dialami oleh peserta didik. Bahkan lebih ekstrim lagi merupakan penyedia bibit-bibit perpecahan di kemudian hari.¹⁹

Suhadi Cholil melihat bahwa potensi besar yang terdapat di dalam Pendidikan Agama nampaknya tidak disadari oleh lembaga pendidikan ataupun guru-guru agama. Kurikulum nasional Pendidikan Agama masih berkutat di seputar ritual-ritual. Pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi juga hanya merupakan pengulangan atas materi sebelumnya. Diskusi-diskusi yang marak tentang Pendidikan Agama yang marak saat inipun masih seputar berapa alokasi waktu dari sekolah kepada Pendidikan Agama dan bagaimana ketersediaan guru agama di sekolah.²⁰

Berkaitan dengan hal ini, catatan dari profesor Johar M. S., menjadi menarik untuk diperhatikan, bahwa Pendidikan Agama saat ini harus mulai masuk pada pemahaman tentang muatan dan materinya, misalnya bagaimana peserta didik dibekali agar bisa berdialog dan mencari *common ground* yang akan menjadi dasar pijakan dan bekal untuk berdialog dengan realitas di sekitarnya, secara khusus realitas keragaman.²¹ Berhadapan dengan kurikulum nasional yang tidak akomodatif terhadap isu ini, lanjutnya, guru tidak boleh bertindak "konsumtif" dalam pengertian tidak menerima kurikulum nasional mentah-mentah tanpa mempertimbangkan persoalan-persoalan lokal. Menurutnya, kurikulum nasional tetap menjadi acuan dalam mendesain kurikulum yang sesuai dengan kondisi lokal. Melalui hal ini, maka dapat dibedakan muatan materi yang primer dan sekunder.²²

Kegiatan belajar mengajar dalam Pendidikan Agama di sekolah tidaklah dimaksud agar peserta didik menguasai materi ilmu atau nilai, tetapi bagaimana setiap peserta didik mengalami sendiri proses berilmu dan hidup di ruang kelas dan berinteraksi di lingkungan sekolah, untuk kemudian berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari pendidikan, termasuk di dalamnya Pendidikan Agama, adalah adanya perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman hidup. Tanpa perubahan tingkah laku, maka pendidikan itu bukanlah

¹⁹ Mengambil contoh untuk masalah ini, disebutkan bahwa ada salah seorang guru Sekolah Dasar yang memberikan pelajaran agama tentang ayat (kitab suci) sekian bunyinya apa, dan pada kelas yang lainnya ditanyakan tentang bagaimana menjalankan sholat ini dan ada berapa rokaatnya? Suhadi Cholil (ed.), *Resonansi Dialog Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi* (Jogjakarta: CRCS, 2008), 37, 42.

²⁰ Ibid., 32.

²¹ Suhadi Cholil (ed.). *Resonansi*, 29.

²² Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 33.

pendidikan yang sejati! Oleh Romo Mangunwijaya, dimaknai dengan *emansipasi* Tugas pendidikan adalah untuk mengusahakan emansipasi.²³ Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk melihat spesifikasi sasaran emansipatorik dalam pendidikan, yaitu mengantar anak²⁴ menjadi: (1) manusia eksplorator, yang suka mencari, bertanya, berpetualang bertolak dari keyakinan bahwa manusia yang bertanya jauh lebih tinggi tingkatnya, dibandingkan yang hanya pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada; (2) manusia kreatif, pembaru, berjiwa terbuka, kritis, kaya imajinasi, berutopia sehat, tidak mudah menyerah pada nasib; (3) manusia integral yang sadar dan paham akan multidimensional kehidupan, paham akan kemungkinan jalan-cara alternatif, pandai membuat pilihan yang benar atas dasar pertimbangan yang benar, yakin akan pluralitas kehidupan, namun sekaligus mampu mengintegrasikannya ke dalam suatu kerangka pengertian dan perilaku sederhana.

Berdasarkan hal ini, maka diperlukan kreatifitas dan komitmen dari guru agama untuk memanipulasi kelas sebagai wahana kehidupan nyata dan membuat simulasi sehingga setiap peserta didik berpengalaman berteori ilmu dan menyusun sendiri nilai kebaikan (kemanusiaan). Pembelajaran di kelas disusun sebagai simulasi kehidupan nyata sehingga peserta didik berpengalaman hidup (dan mengekspresikan cara berinteraksi) sebagai warga masyarakat.²⁵ Berkaitan dengan kenyataan bahwa Pendidikan Agama yang berlangsung di sekolah formal dikotak-kotakan berdasarkan kelompok agama masing-masing dari peserta didik, maka kreatifitas ini sangat diperlukan, bahwa evaluasi Pendidikan Agama bukanlah terjadi pada pertemuan (tatap muka) di kelas, tetapi dalam interaksi dengan orang lain di luar kelas. Jadi, peserta didik dipersiapkan dan dibekali untuk siap berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya sebagai wujud sebuah evaluasi Pendidikan Agama.

Pendidikan Agama berbasis paham multikultural di Indonesia menyangkut tiga hal jenis transformasi, yakni (1) transformasi diri, (2) transformasi sekolah dan proses

²³ Sindhunata, *Mengenal Romo Y. B. Mangunwijaya, Pergulatan Intelektual dalam Era Kegelisahan* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 273.

²⁴ Konsep ini dikembangkan oleh Romo Mangun pada konteks pengembangan pendidikan dasar. Tetapi, dalam rangka pendidikan sebagai tugas setiap insan, maka kami mengapresiasi konsep ini pada tataran konsep pendidikan sebagai pembelajaran seumur hidup. Oleh karena itu, kata anak pada bagian ini, kami pahami sebagai peserta didik. Bdk. Ibid., 273.

²⁵ Abdul Munie Mulkhan, "Pendidikan Agama Berbasis Budaya", suplemen dalam Choiril Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 261-262.

belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, Pendidikan Agama berbasis paham multikultural menggeser muatan-muatan materi kurikulum Pendidikan Agama yang bersifat informatif dan dogmatis (sebagai materi sekunder), dengan materi-materi yang membekali peserta didik untuk siap berinteraksi dengan orang lain yang beridentitas lain (sebagai materi primer), serta kreatifitas kelas Pendidikan Agama yang memungkinkan sebuah simulasi bagi peserta didik untuk siap berinteraksi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlihat jelas bahwa materi apa yang diajarkan dan dipelajari oleh peserta kelas Pendidikan Agama Kristen menjadi penting untuk dikaji. Apakah materi yang diajarkan dan dipelajari sudah bermuatankan nilai-nilai multikulturalisme ataukah belum. Dalam kerangka demikianlah, penelitian ini disusun dengan judul: "Suluh Siswa dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Analisis Kritis."

2. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, kami memaparkan sejumlah hasil penelitian sebelumnya terhadap konsep dan pengembangan pendidikan multikultural pada konteks Indonesia. Kami memaparkannya dalam rangka melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan dalam karya ilmiah ini.

Di Indonesia, kajian tentang pendidikan multikultural belum banyak dilakukan. Ada beberapa praktisi dunia pendidikan yang melakukan kajian terhadap pendidikan multikultural, antara lain HAR Tilaar, Ainul M. Yaqin, Choirul Mahfud, Ngainum Yakin dan Achmad Sauqi. Dari sekian nama tersebut, beberapa di antaranya mengarahkan pendidikan multikultural di Indonesia pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan multikultural yang diterapkan pada Pendidikan Agama Kristen sangat jarang ditemukan referensinya, kalau bisa dikatakan belum ada sama sekali.

Profesor H.A.R. Tilaar dalam buku *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan*²⁷ (Penerbit: Grasindo, Jakarta, 2005) menguraikan gagasan-gagasan dasar tentang pendidikan multikultural serta sejarah perkembangan pendidikan multikultural di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada,

²⁶Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, xi.

²⁷ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2005).

Australia, dan Afrika Selatan. Di dalamnya juga berisikan kajian-kajian historis akan sejarah lahir dan berkembangnya paham multikulturalisme.

Multikulturalisme, oleh HAR Tilaar, merupakan modal sosial untuk mewujudkan visi nasionalisme Indonesia baru yang erat berkaitan dengan konsep nasionalisme dan identitas nasional Indonesia. Pada tahap ini, pendidikan memainkan peran signifikan yakni sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila, yakni Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan identitas nasional Indonesia. Visi nasionalisme Indonesia baru adalah Indonesia yang bersatu dan demokratis serta menghargai dan menghormati HAM.

Dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dan menghormati HAM, maka pola pedagogik yang diperlukan oleh masyarakat multikultural Indonesia adalah pedagogi kesetaraan (*equity pedagogy*). Dalam pendidikan kesetaraan, kita menghormati kesetaraan dari berbagai jenis budaya dalam masyarakat Indonesia, kesetaraan di dalam kehidupan bersama dalam mengurangi gap yang semakin menonjol antara yang kaya dan yang miskin, kesetaraan gender, dan kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Pada dasarnya pendidikan kesetaraan berasaskan pada konsep kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) seperti yang dikemukakan oleh Charles Taylor, tercipta suatu kondisi yang memungkinkan setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam komunitas. Politik pengakuan ini mencakup pengakuan akan kesetaraan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.

HAR Tilaar mengidentifikasi lima program prioritas dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia yakni pembentukan lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan, pendidikan kewargaan, kurikulum pendidikan multikultural, kebijakan perbukuan dan informasi, dan pendidikan guru. Dalam menjalankan lima program prioritas ini harus didasarkan pada paling kurang tiga prinsip dasar penyusunan, yakni pertama pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan (*equity pedagogy*). Kedua, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia cerdas. Manusia Indonesia cerdas dicirikan dengan, pertama, manusia yang cerdas-pandai (*educated*) yang diindikasikan oleh kemampuan analitis, kemampuan menentukan pilihan, menguasai ilmu pengetahuan dan gemar

, Karangan Smiah^
acuan yang bertu

2 maka saya
berarti

belajar. Kedua, manusia yang energik-kreatif yang diindikasikan dengan adanya daya kreatif, rajin, kerja keras dan tahan uji. Ketiga, manusia yang responsif terhadap masyarakat demokratis, yang diindikasikan dengan toleransi terhadap perbedaan, memiliki semangat persatuan Indonesia yang pluralistik, dan bersifat inklusifisme. Keempat, manusia yang ber-daya guna (*skilled*) yang diindikasikan oleh adanya keterampilan yang bermanfaat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam Indonesia. Kelima, manusia yang memiliki akhlak mulia (moral, religius), yang diindikasikan oleh sikap anti korupsi, antikorupsi dan antinepotisme. Keenam, manusia yang memiliki sopan santun, yang diindikasikan oleh mengenal adat-istiadat setempat dan mengenal tata cara pergaulan internasional.

Ainul M. Yaqin dalam buku Pendidikan Multikultural²⁸ menyatakan bahwa krisis multidimensi yang dialami negara Indonesia, diakui ataupun tidak, disebabkan oleh kegagalan mengelola perbedaan kultural yang ada di Indonesia. Krisis multidimensi ini muncul dalam rupa berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM yang terus menerus terjadi di Indonesia yang dalam prakteknya terejawantah dalam bentuk kriminalitas, korupsi, politik uang, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengesampingan hak-hak minoritas, pengesampingan terhadap nilai-nilai budaya lokal, kekerasan antar pemeluk agama, dan sebagainya.

Salah satu upaya preventif untuk membangun kesadaran dan pemahaman generasi mendatang akan pentingnya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam pergaulan di dalam masyarakat yang mempunyai latarbelakang kultural yang beragam, seperti Indonesia, adalah melalui penerapan pendidikan multikultural. Melalui pendidikan multikultural diharapkan bahwa institusi pendidikan formal Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dapat menghasilkan lulusan sekolah atau universitas yang tidak hanya mempunyai kemampuan kognitif (pengetahuan), dan psikomotorik (keterampilan), melainkan juga sikap (afektif), yang demokratis, humanis, pluralis dan adil.

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural menurut M. Ainul Yaqin dapat dijelaskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: bagaimana membangun dan mewujudkan paradigma keberagamaan yang inklusif (pada konteks Pendidikan Agama), bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman untuk

²⁸ Ainul M. Yaqin, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005).

belajar. Kedua, manusia yang energik-kreatif yang diindikasikan dengan adanya daya kreatif, rajin, kerja keras dan tahan uji. Ketiga, manusia yang responsif terhadap masyarakat demokratis, yang diindikasikan dengan toleransi terhadap perbedaan, memiliki semangat persatuan Indonesia yang pluralistik, dan bersifat inklusifisme. Keempat, manusia yang ber-daya guna (*skilled*) yang diindikasikan oleh adanya keterampilan yang bermanfaat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam Indonesia. Kelima, manusia yang memiliki akhlak mulia (moral, religius), yang diindikasikan oleh sikap anti korupsi, antikorupsi dan antinepotisme. Keenam, manusia yang memiliki sopan santun, yang diindikasikan oleh mengenal adat-istiadat setempat dan mengenal tata cara pergaulan internasional.

Ainul M. Yaqin dalam buku Pendidikan Multikultural²⁸ menyatakan bahwa krisis multidimensi yang dialami negara Indonesia, diakui ataupun tidak, disebabkan oleh kegagalan mengelola perbedaan kultural yang ada di Indonesia. Krisis multidimensi ini muncul dalam rupa berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM yang terus menerus terjadi di Indonesia yang dalam prakteknya terjawab dalam bentuk kriminalitas, korupsi, politik uang, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengesampingan hak-hak minoritas, pengesampingan terhadap nilai-nilai budaya lokal, kekerasan antar pemeluk agama, dan sebagainya.

Salah satu upaya preventif untuk membangun kesadaran dan pemahaman generasi mendatang akan pentingnya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam pergaulan di dalam masyarakat yang mempunyai latarbelakang kultural yang beragam, seperti Indonesia, adalah melalui penerapan pendidikan multikultural. Melalui pendidikan multikultural diharapkan bahwa institusi pendidikan formal Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dapat menghasilkan lulusan sekolah atau universitas yang tidak hanya mempunyai kemampuan kognitif (pengetahuan), dan psikomotorik (keterampilan), melainkan juga sikap (afektif), yang demokratis, humanis, pluralis dan adil.

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural menurut M. Ainul Yaqin dapat dijelaskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: bagaimana membangun dan mewujudkan paradigma keberagamaan yang inklusif (pada konteks Pendidikan Agama), bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman untuk

²⁸ Ainul M. Yaqin, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005).

membangun sikap sensitif gender, bagaimana membangun sikap saling menghargai keragaman bahasa, perbedaan kemampuan dan perbedaan umur, bagaimana membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial, dan bagaimana membangun sikap anti diskriminasi etnis? Rekomendasi yang kami berikan melalui pengkajian buku ini adalah perlunya penulisan dan publikasi buku pendidikan multikultural yang lebih spesifik seperti manajemen pendidikan multikultur, administrasi pendidikan multikultur, kurikulum pendidikan multikultur, serta strategi belajar mengajar multikultural, dan pentingnya isu pendirian pusat studi pendidikan multikultural atau bahkan menyusun dan menciptakan program studi (mata pelajaran) pendidikan multikultur. Selain itu perlu juga diadakan seminar, workshop atau bahkan pelatihan pendidikan multikultur dan perlunya dialog dan dukungan dari para ahli lintas disiplin ilmu, karena kajian pendidikan multikultural merupakan kajian interdisipliner.

Choirul Mahfud dalam buku *Pendidikan Multikultural*²⁹ menguraikan upaya dari penulisnya untuk memberi kajian pendidikan multikultural pada konteks Indonesia. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia (yang diibaratkan seperti mozaik yang kaya akan keanekaragaman) adalah pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik baik konflik vertikal maupun horisontal dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia seharusnya melihat perbedaan dan keanekaragaman tersebut sebagai sebuah aset bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Kedua, supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya (dalam hal merespons dan berpartisipasi dalam gelombang globalisasi). Siswa diharapkan melalui pendidikan multikultural dapat diberi pengenalan akan keanekaragaman budaya, baik keragaman pada tingkat lokal dalam negeri Indonesia, maupun pada tingkat internasional dunia. Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, atau guna memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai siswa dengan ukuran dan tingkatan tertentu, maka pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi bersifat unggul. Keempat, sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural. Hal ini bertolak dari cita-cita reformasi Indonesia untuk membangun Indonesia baru. Inti dari cita-cita ini adalah terwujudnya sebuah masyarakat sipil yang demokratis, ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintah bebas KKN,

²⁹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.

Secara khusus, buku ini diarahkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal pengelolaan konflik yang muncul dalam masyarakat majemuk Indonesia. Kami mengambil contoh potret diskriminasi etnis Tionghoa. Mahfud berpendapat bahwa konflik yang diawali dengan semangat egosentrisme, etnosentrisme dan chauvinisme membentuk sebuah klaim kebenaran (*truth claim*). Dalam relasi sosial, gesekan antara klaim kebenaran (*truth claim*) inilah yang menimbulkan konflik. Oleh Mahfud, klaim kebenaran ini disebut sebagai sebuah bentuk kelainan jiwa yang bernama narsisme. Narsisme berarti seseorang atau kelompok masyarakat menganggap dirinya paling sempurna jika dibandingkan dengan yang lainnya.

Melalui gagasan pendidikan multikultural, oleh Choirul Mahfud, dinilai dapat mengakomodir kesetaraan dalam perbedaan. Prinsip-prinsip dasar dalam multikulturalisme diharapkan dapat memberikan ruang yang luas bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan secara otonom. Dengan demikian, akan tercipta suatu sistem budaya dan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian bangsa.

Ngainum Yaqin dan Achmad Sauqi dalam buku Pendidikan Multikultural³⁰ melakukan kajian terhadap pendidikan multikulturalisme dan urgensi pengembangannya bagi konteks Indonesia. Pengembangan pendidikan multikulturalisme di Indonesia secara khusus dikaji dari perspektif doktrin dan ajaran Islam. Pendidikan multikultural yang menekankan asas keberagaman inklusif (melawan asas keberagaman eksklusif) dilihat sesuai dengan asas keislaman untuk dikembangkan pada konteks Indonesia yang majemuk. Hasil dari pengkajian buku ini adalah rekomendasi untuk melakukan re-orientasi penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam menjadi pendidikan yang berwajah multikultural dengan memberi penekanan pada bagaimana evaluasi hidup islami pada konteks Indonesia yang plural serta pemantapan kurikulum pluralis-multikultural.

³⁰ Ngainum Naim dan Achmad Sauqi, *Konsep dan Aplikasi Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Penerbit AM, 2008).

Praktek dalam Pendidikan Agama yang cenderung bersifat pengajaran yang didominasi oleh pemahaman tekstual ajaran agama yang dogmatis dan eksklusif menjadi kritikan dari kajian dalam buku ini. Karena implikasi dari pola pengajaran Pendidikan Agama semacam ini akan membentuk cara pandang peserta kelas Pendidikan Agama yang cenderung melihat penganut agama berbeda sebagai pihak yang salah, dan karenanya harus "dikalahkan." Pada kondisi ini, sedikit banyaknya, pendidikan justru menyumbang dan memperumit konflik yang terjadi dalam interaksi antarpenganut agama. Di sinilah Pendidikan Multikulturalisme dibutuhkan dalam rangka pengembangan Pendidikan Islam yang berwawasan pluralis-multikultural.

Berdasarkan kajian pustaka ini maka penelitian yang kami lakukan memiliki ciri tersendiri yakni pengembangan Pendidikan Agama Kristen sebagai media pengembangan konsep multikulturalisme, meski dalam penguraian materi-materi dalam karya ini kami memanfaatkan karya-karya tersebut sebagai sumber referensi.

3. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Strategi pendidikan multikultural yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pendidikan multikultural pada jalur pendidikan formal. Berkaitan dengan pemahaman bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang dapat diaplikasikan pada seluruh mata pelajaran, maka kami dalam penelitian ini membatasinya pada mata pelajaran Pendidikan Agama, secara khusus Pendidikan Agama Kristen. Dengan asumsi bahwa Pendidikan Agama merupakan media yang paling efisien untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dalam hal bagaimana berinteraksi dengan orang yang memiliki latarbelakang budaya yang berbeda, secara khusus perbedaan latarbelakang agama.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pokok kajian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pendidikan Agama Kristen berbasiskan multikulturalisme. Dalam rangka mempersempit spektrum kajian, dengan tanpa mengesampingkan pentingnya tingkatan pada tahap yang lain (misalnya pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan tingkat pertama), kajian pokok penelitian ini diarahkan pada pengkajian terhadap teks (buku pelajaran) bagi peserta kelas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Hal ini penting karena peserta didik pada tingkatan ini merupakan anggota masyarakat yang potensial untuk mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme, karena dari segi usia sekolah, umumnya pada tingkatan ini peserta kelas merupakan anggota masyarakat pada akhir masa remaja (menuju masa dewasa awal) dalam hal menentukan pilihan-pilihan dan praktek

nilai yang dianut dalam masyarakat. Selain itu kreativitas kelas dalam bentuk metode pembelajaran, misalnya diskusi, lebih mungkin dikembangkan pada tahapan usia Sekolah Menengah Atas. Buku teks pelajaran yang dikaji adalah buku pegangan guru. Dengan asumsi bahwa guru memegang peranan yang sangat penting dalam memotivasi dan memfasilitasi siswa dalam kelas pelajaran agama.³¹ Hal ini perlu diperjelas sebab pada praktiknya, buku pegangan yang ada dalam kelas Pendidikan Agama Kristen terbagi dalam dua jenis buku, yakni Buku Guru dan Buku Siswa, meski dalam penggunaannya kedua jenis buku ini saling melengkapi, namun penjabaran materi lengkap terdapat dalam Buku Guru.

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pengkajian karya ilmiah ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana signifikansi konsep multikulturalisme dan pendidikan multikultural pada konteks masyarakat majemuk?
2. Apakah materi, proses pembelajaran dan bentuk evaluasi dalam buku guru Pendidikan Agama Kristen sudah bermuatankan dan terdapat kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip multikulturalisme?

4. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah seperti yang tersebut di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

Mendesripsikan dan menganalisis materi, proses pembelajaran dan bentuk evaluasi yang ada dalam buku pelajaran Pendidikan Agama Kristen dari perspektif multikulturalisme, secara khusus buku pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang disusun oleh kelompok Kerja PAK-PGI, yakni buku Suluh Siswa pegangan guru.

5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi teoritik bagi studi multikulturalisme di Indonesia, secara khusus pengembangan pendidikan multikultural. Pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia ini

³¹ Menurut Robert M. Gagne, dikutip dalam buku Suluh Siswa X, guru memegang tiga peranan penting dalam kelas pelajaran yakni sebagai perancang pengajaran (*designer of instruction*), sebagai pengelola pengajaran (*manager of instruction*) dan sebagai penilai prestasi belajar siswa (*evaluator of student learning*). Kelompok kerja PAK PGI, *Suluh Siswa 1: Bertumbuh Dalam Kristus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), xxii.

secara khusus diarahkan pada pengembangan Pendidikan Agama Kristen kontekstual, yakni Pendidikan Agama Kristen berbasis multikultural. Serta secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman bagi upaya-upaya pengelolaan konflik yang terjadi akibat interaksi antarbudaya dalam masyarakat multikultural Indonesia.

6. Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terhadap fenomena kemasyarakatan yang diteliti ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti berupaya untuk menggambarkan, menganalisis, serta menginterpretasikan kesatuan-kesatuan dari variabel-variabel yang diteliti, melalui pengamatan terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan pokok, serta fenomena-fenomena yang terdapat dalam masyarakat, secara khusus yang berkaitan dengan pokok penelitian. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan serta kumpulan perilaku dari masyarakat yang diteliti, secara sistematis, faktual dan akurat.³²

B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.³³ Mengutip Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moleong mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data, sumber data tersebut berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada

³²Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2003), 136-137.

³³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29. Sementara Hadawi dan Mimi Martin mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik / matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), 174.

³⁴ LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), 3.

dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain.³⁵ Di samping itu, untuk mendukung data-data kepustakaan, kami juga menggunakan metode observasi dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur kami lakukan dengan beberapa guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah umum, sedangkan observasi, kami lakukan pada kelas Pendidikan Agama Kristen.

Kami menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), secara khusus untuk mendeskripsikan buku pegangan Pendidikan Agama Kristen yang digunakan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dalam hal ini buku yang disusun oleh Kelompok Kerja PAK PGI yang berjudul Suluh Siswa, secara khusus buku bagi pegangan guru. Rangkaian metode analisis isi kualitatif bertujuan untuk menganalisis materi Pendidikan Agama Kristen dalam buku Suluh Siswa, dalam hal ini untuk memberi penilaian apakah materi buku Suluh Siswa -yang mempunyai fungsi sangat penting dalam proses belajar mengajar kelas Pendidikan Agama Kristen- cukup mendorong proses pembelajaran di kelas Pendidikan Agama Kristen agar para siswa bisa siap menghadapi pluralitas agama di sekolah dan terutama di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk mengelola pluralitas tersebut.

C. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data.³⁶ Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, kami disini menggunakan metode analisis deskriptif yakni suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³⁷ Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam konsep tersebut, kemudian data tersebut akan diinterpretasi, yakni melalui menarik benang merah dari data-data tersebut. Kemudian menyusunnya dalam sebuah ringkasan interpretatif, yang kemudian disimpulkan dalam kesimpulan yang telah diuji dan dapat diverifikasi.

³⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 45.

³⁶ Lexy Moleong, *Metodologi*, 103.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 18.

7. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, hasil penelitian akan disusun dalam lima bab pembahasan. Kelima bab pembahasan itu adalah sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan, berisikan pemaparan latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan pemaparan tentang kajian teoritis tentang pendidikan multikulturalisme. Kajian ini berisikan pengertian, sejarah lahir dan berkembangnya pendidikan multikultural. Di samping itu, dalam bab pembahasan ini, terdapat pembahasan tentang signifikansi pendidikan multikultural pada konteks Indonesia.

Bab III berisikan deskripsi materi dalam buku pelajaran Pendidikan Agama Kristen yang disusun oleh Kelompok Kerja PAK PGI pada tingkat Sekolah Menengah Atas yakni untuk kelas X, XI dan XII.

Bab IV berisikan analisis kritis dan refleksi terhadap materi, proses pembelajaran dan bentuk evaluasi kelas Pendidikan Agama Kristen seperti yang terdapat dalam buku Suluh Siswa 1, 2 dan 3 untuk kelas X, XI, dan XII. Serta pengembangan Pendidikan Agama Kristen sebagai media internalisasi nilai-nilai luhur universal agama Kristen dan pengembangan PAK kontekstual Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pokok kajian penelitian ini. Pada bagian ini, kami menyampaikan langkah-langkah strategis pengembangan Pendidikan Agama Kristen dari perspektif pendidikan multikultural.